

## SEJARAH REVOLUSI KOTABARU: PERAN SOSIAL POLITIK DALAM PERJUANGAN KEMERDEKAAN INDONESIA DI YOGYAKARTA

Ranni Safira Mahanani<sup>1</sup> Muhammad Riffa'i<sup>2</sup>, Dheny Wiratmoko<sup>3</sup>

<sup>1,2,3</sup> Universitas Negeri Yogyakarta

### ABSTRAK

Kawasan Kotabaru Yogyakarta, yang pada awal abad ke-20 dirancang sebagai enclave elit Eropa (Nieuwe Wijk) dengan politik segregasi spasial yang ketat, mengalami transformasi fungsi yang dramatis sejak akhir era kolonial, masa pendudukan Jepang, hingga awal Revolusi Kemerdekaan Indonesia. Artikel ini menganalisis proses tersebut dengan fokus pada dimensi sosial-politik, khususnya peristiwa “Revolusi Kotabaru” 7 Oktober 1945 yang menjadikan kawasan ini target utama pengambilalihan laskar pejuang. Dengan menggunakan pendekatan sejarah sosial-politik dan teori produksi ruang, perebutan ruang simbolik, serta konsep *spatial appropriation*, kajian ini menunjukkan bahwa Kotabaru tidak hanya direbut secara fisik, melainkan juga diartikulasikan ulang sebagai pusat pemerintahan, perawatan pejuang, pendidikan politik, rapat rahasia, dan diplomasi Republik. Transformasi ini membuktikan bahwa dinamika mikro di tingkat lokal khususnya perebutan dan redefinisi makna ruang kota merupakan elemen krusial dalam keberhasilan perjuangan kemerdekaan di Yogyakarta sebagai ibu kota sementara Republik Indonesia (1946–1949).

**Kata kunci:** enclave kolonial, Kotabaru, revolusi, transformasi ruang, Yogyakarta

### ABSTRACT

*The Kotabaru area of Yogyakarta, which in the early 20th century was designed as an elite European enclave (Nieuwe Wijk) with strict spatial segregation policies, underwent a dramatic transformation in function from the end of the colonial era, through the Japanese occupation, to the beginning of the Indonesian Independence Revolution. This article analyzes this process with a focus on the socio-political dimension, particularly the events of the “Kotabaru Revolution” on October 7, 1945, which made this area a prime target for takeover by the revolutionary forces. Using a socio-political historical approach and theories of spatial production, symbolic space and the concept of spatial appropriation, this study shows that Kotabaru was not only physically seized, but also rearticulated as a center of government, care for fighters, political education, secret meetings, and diplomacy for the Republic. This transformation proves that micro-dynamics at the local level, particularly the struggle for and redefinition of the meaning of urban space, were crucial elements in the success of the independence struggle in Yogyakarta as the temporary capital of the Republic of Indonesia (1946–1949).*

**Keywords:** colonial enclave, Kotabaru, revolution, spatial transformation, Yogyakarta

### 1. PENDAHULUAN

Proklamasi Kemerdekaan Indonesia pada 17 Agustus 1945 bukanlah titik akhir perjuangan tapi menjadi permulaan

dari perjuangan panjang untuk mempertahankan kedaulatan bangsa. Pada periode awal pascaproklamasi kemerdekaan (1945-1946), pemerintah

Indonesia melakukan relokasi pusat pemerintahan sebanyak dua kali sebagai respons terhadap dinamika keamanan. Relokasi pertama terjadi pada bulan Januari 1946 ke Yogyakarta karena pada saat itu Jakarta diduduki oleh pasukan *Netherland Indies Civil Administration* (NICA) sehingga memaksa perpindahan ibu kota untuk menjamin kelangsungan pemerintahan nasional.<sup>(1)</sup> Pada saat itu Yogyakarta tidak hanya berfungsi sebagai ibu kota pemerintahan tetapi juga dijadikan sebagai simbol penegakan identitas nasional Indonesia yang baru lahir. Dalam konteks inilah, setiap jengkal tanah di Yogyakarta menyimpan narasi perjuangannya sendiri termasuk kawasan Kotabaru yang saat itu dikenal sebagai kawasan permukiman elit Belanda.

Kotabaru atau yang dahulu dikenal sebagai "Nieuwe Wijk", dibangun oleh pemerintah kolonial Hindia Belanda pada awal abad ke-20. Kawasan ini dirancang guna mengakomodasi para eksekutif swasta dan mendorong pemekaran kota. Perkembangan ini merupakan perluasan dari lanskap permukiman kolonial yang telah dimulai dengan pembangunan perumahan untuk staf perkeretaapian dan birokrat Pemerintah Hindia Belanda.<sup>(2)</sup> Arsitektur dan tata kotanya mencerminkan politik segregasi kolonial, menciptakan sebuah "enclave" Eropa di jantung Yogyakarta.<sup>(3)</sup> Pasca kemerdekaan, keberadaan Kotabaru yang simbolis ini menjadi sebuah paradoks yaitu menjadi monumen warisan kolonial sekaligus sebuah arena yang harus direbut dan ditaklukkan secara politis oleh Republik muda.

Ketegangan antara "Republik Yogya" dan "enclave Kotabaru" memuncak pada peristiwa yang dikenal sebagai "Revolusi Kotabaru" atau "Pertempuran Kotabaru". Kegagalan perundingan yang berlangsung di Gedung Butaico, Kotabaru, menjadi

penyebab yang memicu pecahnya pertempuran tak terelakkan. Atas mobilisasi dari berbagai laskar perjuangan yakni Komite Nasional Indonesia Daerah (KNID), Barisan Penjagaan Umum (BPU), Badan Keamanan Rakyat (BKR), dan Polisi Istimewa (PI) rakyat dan pemuda yang telah berkumpul di lokasi akhirnya melancarkan serangan pada 7 Oktober 1945 pukul 04.00 WIB.<sup>(4)</sup> Aksi ini bukan sekadar serangan sporadis tapi merupakan sebuah gerakan terorganisir yang mencerminkan peralihan kekuasaan secara de facto dari Jepang kepada Republik Indonesia.

Meskipun Revolusi Kotabaru tercatat dalam berbagai kronik sejarah lokal Yogyakarta, pemahaman kita tentang peristiwa ini masih sering terbatas pada narasi militeristik dan heroik. Banyak literatur yang menggambarkan semata-mata sebagai aksi pengambil alih kekuasaan fisik sebuah kawasan tanpa mengeksplorasi lebih dalam dimensi sosial politik yang melatarbelakanginya serta konsekuensi yang ada.<sup>(5)</sup> Padahal, sebagai sebuah peristiwa di ibu kota Republik, Revolusi Kotabaru pastilah sarat dengan dinamika politik, negosiasi, dan konflik ideologis di antara berbagai kekuatan yang ada baik dari kalangan pemerintah Republik, militer, maupun laskar-laskar pejuang.

Lebih spesifik artikel ini akan menjawab dua pertanyaan mendasar yang pertama bagaimana transformasi fungsi Kawasan Kotabaru dari enclave kolonial menjadi pusat aktivitas sosial-politik Republik Indonesia selama revolusi. Kedua, dalam bentuk apa saja peran sosial dan politik yang dilakukan oleh berbagai aktor di Kawasan Kotabaru dalam mendukung perjuangan kemerdekaan. Dengan memusatkan analisis pada aspek sosial-politik, penelitian ini berusaha mengisi celah

dalam historiografi Revolusi Nasional Indonesia yang seringkali terfragmentasi antara narasi-narasi makro di tingkat pusat dan mikro di tingkat daerah. Kajian ini berargumen bahwa tanpa memahami dinamika lokal seperti di Kotabaru, pemahaman kita tentang revolusi Indonesia akan tetap parsial dan tidak utuh.

## **2. METODE**

Artikel ini disusun dengan menggunakan metode penelitian sejarah yang dirancang oleh Kuntowijoyo (2013) yang di dalamnya mengintegrasikan pendekatan sejarah sosial-politik. Tujuan metodologisnya adalah untuk merekonstruksi kronologi peristiwa Revolusi Kotabaru sekaligus menganalisis secara kritis dinamika dan relasi kuasa sosial politik yang menjadi penggerakannya. Proses penelitian ini dijalankan secara operasional melalui tahapan baku dalam ilmu sejarah, yakni dimulai dari heuristik atau pengumpulan sumber, dilanjutkan dengan kritik sumber untuk menilai kredibilitas data, kemudian interpretasi untuk menghubungkan fakta-fakta, dan diakhiri dengan penyajian dalam bentuk historiografi atau penulisan narasi sejarah.(6)

Jenis data yang digunakan bersifat kualitatif dengan mengandalkan dua jenis sumber utama, yaitu sumber primer dan sekunder. Sumber primer diperoleh dari dokumen arsip kontemporer yang disimpan di Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI) seperti laporan pemerintah Republik Indonesia dari kementerian-kementerian terkait dan arsip Komite Nasional Indonesia Daerah Yogyakarta. Sumber primer krusial lainnya adalah surat kabar sezaman, terutama "Kedaulatan Rakyat" pada edisi 1945-1946, yang memberikan gambaran langsung tentang narasi publik dan suasana zaman. Selain itu, memoar dan kesaksian para pelaku sejarah

digunakan untuk mendapatkan perspektif subjektif dari dalam (insider's view) yang sangat berharga meskipun memerlukan sikap kritis. Sumber sekunder berupa buku monograf, disertasi, dan artikel jurnal akademis dimanfaatkan untuk membangun kerangka teoritis dan peta historiografi yang sudah ada.

Teknik pengumpulan data dilakukan secara sistematis melalui studi kepustakaan mendalam dan riset arsip langsung. Studi kepustakaan difokuskan untuk mengumpulkan dan memetakan sumber-sumber sekunder, sementara riset arsip dilakukan untuk menelusuri dan mengumpulkan dokumen-dokumen primer di lembaga terkait. Terhadap setiap dokumen yang terkumpul, kemudian diterapkan teknik analisis isi (*content analysis*) untuk mengidentifikasi tema, pola, dan sudut pandang tertentu yang relevan dengan pertanyaan penelitian tentang peran sosial-politik.(7) Data yang telah terkumpul kemudian dianalisis menggunakan prosedur kritik sumber, baik eksternal maupun internal. Kritik eksternal dilakukan untuk menilai otentisitas fisik dokumen, sedangkan kritik internal diterapkan untuk mengevaluasi kredibilitas dan muatan bias dalam isi dokumen tersebut. Fakta-fakta sejarah yang telah teruji kemudian diinterpretasikan secara sintesis dengan menghubungkan berbagai data dari sumber yang berbeda-beda.

## **3. HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **3.1 Kelahiran Kotabaru (Nieuwe Wijk) Sebagai Kota Taman Untuk Kaum Elite (1918-1930)**

Pembangunan Nieuwe Wijk yang kelak dikenal sebagai Kotabaru tidak dapat dipisahkan dari kebijakan politik etis dan kebutuhan praktis pemerintah kolonial. Seiring dengan berkembangnya pemerintahan Hindia Belanda di Yogyakarta, terjadi peningkatan jumlah pegawai negeri, tentara KNIL, dan profesional Eropa yang membutuhkan permukiman yang layak dan sesuai dengan standar Eropa. Maka dari itu mulailah dibangun daerah pemukiman yang nyaman bagi orang Eropa mulai dari sekolah, rumah sakit, jalan, dan lain-lain. Fasilitas seperti peralatan rumah, cara berpakaian juga didatangkan langsung resmi dari Eropa.(8) Kebijakan segregasi spasial (*spatial segregation*) sengaja diterapkan untuk menciptakan jarak fisik dan simbolis antara penguasa kolonial dengan populasi pribumi. Perencanaan kawasan ini dikelola oleh *Dienst der Gemeentewerken* (Dinas Pekerjaan Umum Kota) di bawah pengawasan langsung Residen Yogyakarta yang merepresentasikan kekuasaan negara kolonial dalam membentuk ruang perkotaan. Pembangunan Kotabaru adalah manifestasi dari "politik moral" yang sekaligus berfungsi sebagai alat kontrol sosial, di mana lingkungan yang tertata rapi dan sehat hanya diakses oleh segelintir elite, sementara mayoritas pribumi tinggal di kampung-kampung yang padat di sekitarnya.

Perencanaan Kotabaru juga tidak lepas dari perkembangan Yogyakarta sebagai kota garnizon dan pusat administrasi. Keberadaan benteng Vredenburg dan Akademi Militer di pusat kota mendorong kebutuhan akan permukiman yang dekat namun terpisah bagi para perwira dan staf administrasi. Instansi seperti *Burgerlijke Openbare Werken* (BOW) atau dikenal sebagai Kantor Pekerjaan Umum Sipil memegang peranan kunci dalam

mendesain kawasan ini sebagai sebuah "enklave Eropa" yang otonom, lengkap dengan segala fasilitas pendukungnya.(9) Pembangunan kawasan semacam ini di berbagai kota Hindia Belanda merupakan strategi untuk mereproduksi budaya Eropa dan menegaskan superioritas rasial di tanah jajahan, sekaligus sebagai respons atas ketakutan akan kesehatan dan keamanan di tengah lingkungan "asing".(10) Tata ruang Kotabaru menerapkan pola grid (kisi-kisi) yang khas model Kota Taman (*Garden City*) ala Ebenezer Howard yang populer di Eropa pada awal abad ke-20. Pola ini menekankan pada keteraturan, efisiensi, dan estetika. Setiap blok dipisahkan oleh jalan yang lebar dan dilengkapi dengan trotoar serta jalur hijau. Kawasan Kotabaru didominasi oleh bangunan bergaya kolonial Belanda yang dicirikan oleh proporsi *head-body-foot* dan prinsip desainnya yang khas. Karakter kawasan ini juga ditandai dengan sistem ruang terbuka hijau, baik yang berfungsi sebagai taman privat di antara bangunan maupun sebagai ruang hijau publik yang luas. Pola radial kawasan ini tercermin dari jalan raya yang dikelilingi pepohonan serta keberadaan sebuah taman pusat yang signifikan.(11)



**Gambar 1.** Peta Kawasan Kotabaru Yogyakarta 1925

Analisis terhadap data spasial peta lama tahun 1925 mengungkapkan bahwa tata guna lahan di Kelurahan Kotabaru pada periode tersebut telah terspesialisasi ke dalam delapan

klasifikasi fungsi utama: jasa, industri, kesehatan, museum, pendidikan, peribadatan, permukiman, pertahanan dan keamanan. Secara spesifik, fungsi-fungsi tersebut diwujudkan dalam berbagai fasilitas, seperti Stasiun Lempuyangan untuk jasa; Pabrik Ubin "Soka" untuk industri; kompleks kesehatan yang terdiri dari Rumah Sakit Petronela (kini Bethesda), Rumah Sakit Militer, dan dua klinik; dan sebuah museum barang antik. Sektor pendidikan didominasi oleh berbagai institusi, antara lain Sekolah Menengah Sementara (*Tidjdelike A.M.S.*), *Kweekschool voor Inlandsche Christelijke Onderwijzers* atau Sekolah Guru Kristen Pribumi, Sekolah Menengah Kristen (Cristelijke M.U.L.O) dan beberapa sekolah lainnya. Sementara itu, fasilitas pendukung lain meliputi Gereja Reformasi untuk peribadatan, sebuah Gudang Militer untuk pertahanan, dan kawasan permukiman.(12)

Arsitektur bangunan di Kotabaru didominasi oleh *Indies Empire style* (1850-1890) yang merupakan adaptasi tropis dari gaya Neoklasik Eropa. *Indische Empire Style* pertama kali diperkenalkan pada era Gubernur Jenderal Daendels (1808-1811) yang merepresentasikan otonomi dan penegasan kekuasaan kolonial. Karakteristik utamanya yang menonjol meliputi: denah simetris penuh, keberadaan *central hall* yang terintegrasi dengan kamar tidur dan teras depan-belakang, teras lebar bergaya Romawi, pemisahan area servis di belakang bangunan utama, serta skala bangunan yang masif dengan taman. Konfigurasi ini tidak hanya menjawab iklim tropis tetapi juga mereproduksi hierarki sosial kolonial di Jawa.(13) Kehidupan sosial di Kotabaru berlangsung dalam lingkaran yang tertutup. Interaksi dengan masyarakat pribumi di sekitarnya bersifat formal dan hierarkis, terutama dalam

hubungan antara majikan dan pembantu rumah tangga. Aktivitas sosial seperti dansa, pertunjukan musik, dan pertemuan klub hanya diadakan untuk kalangan mereka sendiri. Ruang-ruang publik seperti taman dan jalanan yang luas pada praktiknya menjadi ruang privat bagi komunitas Eropa, di mana norma-norma dan tata krama Eropa diberlakukan. Kehidupan yang terbagi-bagi ini adalah upaya untuk mempertahankan "kepenjaraan kemurnian" (*the prison of purity*) dan membangun tembok simbolis yang membedakan antara "kita" (Eropa) dan "mereka" (pribumi).(14)

### 3.2 Transisi Akhir Kolonial Dan Awal Pendudukan Jepang

Meskipun Kotabaru telah dirancang bak Eropa Kecil di tengah kota Yogyakarta, hal ini tidak dapat membuatnya abadi sebagai hunian bagi orang Eropa yang menetap di Yogyakarta. Mengapa demikian? Karena pada akhir dekade 1930-1940-an, Kawasan Kotabaru di Yogyakarta mengalami gejolak yang signifikan akibat krisis ekonomi global dan ketegangan geopolitik yang melanda Hindia Belanda. Depresi ekonomi yang terjadi pasca 1929 berhasil melumpuhkan struktur kolonial Belanda yang menyebabkan banyak pegawai Eropa termasuk juga eksekutif perkebunan dan birokrat kehilangan pekerjaan atau mengalami pemotongan gaji yang drastis. Di Kotabaru yang telah dirancang sebagai *enclave* elit Eropa dengan rumah-rumah bergaya Indies Empire dengan megah dan taman-taman hijau berakhir dengan Sebagian disewakan dengan harga murah kepada kalangan Indonesia yang lebih mampu seperti pamong praja atau para intelektual pribumi. Selain disewakan, adapun rumah yang dibiarkan kosong begitu saja. Kebijakan segregasi spasial yang sangat ketat mulai retak, misalnya beberapa rumah di

jalan Abu Bakar Ali dan sekitarnya mulai ditempati oleh keluarga campuran Indo-Eropa atau bahkan pribumi kelas menengah atas, meskipun secara formal memang masih dibatasi oleh aturan dari *Dienst der Gemeentewerken*.<sup>(13)</sup> Situasi semacam inilah yang menciptakan ketegangan sosial di mana norma-norma Eropa seperti klub sosial dan pesta dansa mulai bercampur dengan interaksi lintas ran yang menjadi tanda awal dari erosi kepenjaraan kemurniaan kolonial yang selama ini menjaga jarak antara "kita" (Eropa) dan "mereka" (pribumi). Jika dianalisis dari sisi aspek ekonomi, kawasan ini sangat bergantung pada impor dari Belanda seperti furniture dan peralatan rumah tangga. Namun pada masa tersebut, mulai mengalami kelangkaan sehingga memaksa penduduk Eropa untuk beradaptasi dengan barang lokal yang secara tidak langsung justru membuka pintu peluang bagi para pengrajin pribumi di kampung-kampung sekitar Kotabaru untuk memasuki pasar elit.

Ketegangan internasional yang ada justru semakin mempercepat transisi ini. Pasalnya pada Mei 1940, pendudukan Jerman atas Belanda memicu deklarasi darurat militer di Hindia Belanda termasuk juga dengan pembekuan aset Jepang dan persiapan pertahanan di Yogyakarta sebagai pusat garnisun. Di Kotabaru yang paling dekat dengan benteng Vredenburg dan Stasiun Lempuyangan dan juga bangunan-bangunan strategis seperti rumah sakit Petronela yang kini dikenal sebagai rumah sakit Bethesda dan gudang militer mulai difungsikan sebagai pos pengawasan dan penyimpanan logistik oleh *Koninklijke Nederlandsch-Indische Leger* (KNIL). Gedung fasilitas pendidikan seperti AMS *Afdeeling B* yang sekarang dikenal dengan SMAN 3 Yogyakarta dan *Christelijke MULO* yang kini dikenal dengan SMA Bopkri 1 juga

ikut dimobilisasi untuk pelatihan sipil meskipun kurikulum yang ada tetap menekankan loyalitas kolonial. Namun pada Desember 1941 setelah serangan Pearl Harbor, negosiasi dengan Jepang gagal dan aset Jepang dibekukan sehingga memicu eskalasi. Di tingkat lokal, hal ini cukup terasa di Kotabaru melalui peningkatan patrol KNIL dan pembatasan pergerakan yang justru menimbulkan ketidakpuasan di kalangan pemuda pribumi yang mulai terpapar propaganda nasionalis melalui surat kabar seperti "Kedaulatan Rakyat". Kawasan yang selama ini merupakan simbol superioritas rasial Belanda berubah menjadi titik rawan pasalnya jalan-jalan lebar dan trotoar hijau yang rapi mulai digunakan untuk latihan militer darurat sementara rumor invasi Jepang mulai menyebar sehingga membuat Sebagian penduduk Eropa mulai mempersiapkan evakuasi.<sup>(15)</sup>

Hingga puncak transisi terjadi pada Maret 1942, Ketika invasi Jepang menyapu Hindia Belanda hanya dalam kurun waktu 3 bulan. Pasukan Jepang mendarat di Jawa pada awal Januari 1942 dan pada 6 Maret 1942, Yogyakarta jatuh tanpa perlawanan yang signifikan dari KNIL yang diakibatkan oleh kalah jumlah dan persenjataan yang kurang mendukung. Di Kotabaru, eksodus massal penduduk Eropa dimulai pada sehari sebelumnya, ketika ratusan keluarga Belanda termasuk juga dengan residen dan perwira KNIL melarikan diri melalui Cilacap menuju ke Australia. Mereka meninggalkan rumah-rumah mewah mereka yang lengkap dengan furniture impor.<sup>(16)</sup>

### **3.3 Kotabaru Pada Masa**

#### **Pendudukan Jepang (1942-1945)**

Memasuki periode pendudukan Jepang pada tahun 1942, fungsi Kawasan Kotabaru mengalami transformasi signifikan menjadi wilayah pendukung logistik dan kepentingan

perang. Situasi ini berlanjut pada masa Revolusi, di mana tatanan hukum mengalami kekosongan sehingga memicu peralihan kepemilikan aset-aset properti bekas Belanda.(17) Rumah-rumah mewah yang ditinggalkan pemilik Belandanya diambil alih dan ditempati oleh para pejabat militer Jepang (*Gunseibu*) dan birokrat pendudukan. Peristiwa ini menunjukkan betapa rapuhnya tatanan kolonial ketika berhadapan dengan pergantian kekuasaan secara paksa. Kondisi inilah yang kemudian menjadi titik awal dari perubahan sosial spasial yang fundamental di kawasan tersebut.(18) Pergantian kekuasaan ini juga mengubah makna ruang Kotabaru. Dari sebuah enklave sipil Eropa, kawasan ini kemudian mengalami militerisasi. Beberapa bangunan strategis dialihfungsikan untuk kepentingan logistik dan administrasi militer Jepang. Menurut teori "*spatial appropriation*". Perebutan ruang fisik seperti ini adalah bagian dari proses produksi ruang sosial baru. Jepang, sebagai kekuatan pendudukan, tidak hanya merebut aset material, tetapi juga berusaha menciptakan tatanan ruang yang mencerminkan hierarki dan nilai-nilai kekuasaannya yang baru, meski seringkali dengan tingkat kekerasan dan disiplin yang lebih keras daripada era Belanda.

Eksodusnya populasi Eropa diikuti oleh masuknya penghuni baru, yang untuk pertama kalinya didominasi oleh orang Indonesia. Namun, yang menempati pada fase awal ini adalah elite Indonesia yang bekerja untuk pemerintah pendudukan Jepang, seperti para pamong praja dan intelektual yang dipekerjakan dalam berbagai jawatan. Perubahan demografi ini merupakan awal dari proses "Indonesianisasi" ruang Kotabaru. Fungsi kawasan pun mulai bergeser dari permukiman elite kolonial

menjadi kantong permukiman bagi elite birokrasi yang sedang naik daun di bawah rezim baru.(19) Perubahan ini tidak terjadi tanpa konflik. Pengambilalihan properti seringkali disertai dengan kekerasan dan penjarahan, mencerminkan ketegangan sosial yang terpendam selama masa kolonial. Namun, di balik kekacauan itu, terbuka peluang bagi segelintir orang Indonesia untuk pertama kalinya mengakses ruang yang sebelumnya terlarang. Proses ini, dalam kerangka teori "*everyday forms of resistance*" dapat dilihat sebagai bentuk pembalikan tatanan (*reversal of order*) di tingkat lokal, di mana simbol-simbol kekuasaan kolonial yang paling kasat mata rumah-rumah mewahnya beralih kepemilikan dan fungsi.(20)

Citra Kotabaru yang merupakan Kawasan Eropa kecil di Yogyakarta mulai luntur. Meski secara fisik bangunannya masih sama, makna sosial dan politisnya telah berubah secara fundamental. Dari simbol kemapanan dan keanggunan kolonial, Kotabaru berubah menjadi simbol aset strategis yang diperebutkan dalam gejolak perang. Kawasan ini menjadi bukti fisik bahwa kekuasaan kolonial tidaklah abadi, dan ruang-ruangnya dapat direbut dan ditaklukkan.(21) Pergeseran simbolik ini sangat penting bagi perkembangan nasionalisme Indonesia. Keberhasilan menduduki kawasan elite Eropa, meskipun awalnya dilakukan oleh Jepang, menanamkan pesan psikologis yang kuat: bahwa yang sebelumnya dianggap tak tergoyahkan ternyata dapat diambil alih. Lunturnya aura eksklusivitas Eropa membuka jalan bagi peran Kotabaru yang lebih sentral dalam narasi perjuangan Republik Indonesia di masa-masa revolusi fisik yang akan datang. Proses ini merepresentasikan sebagai "*erosion of colonial prestige*," sebuah prasyarat penting untuk membangun

imajinasi tentang sebuah komunitas nasional yang merdeka dan setara. Dengan kata lain, tanpa adanya transformasi persepsi yang dipicu masa kependudukan Jepang dari “tak tersentuh” menjadi “bisa direbut” sehingga memungkinkan serangan 7 Oktober 1945 tidak akan secepat dan se masif itu. Kotabaru telah berubah dalam benak rakyat Indonesia dari simbol penindasan menjadi trofi revolusi yang paling menggiurkan untuk sebuah perubahan mental yang jauh lebih revolusioner daripada sekadar pergantian bendera-bendera di atas gedung-gedungnya.

### **3.4 Faktor Penentu Kotabaru Sebagai Sasaran Pengambilalihan Pada Awal Revolusi Fisik**

Kependudukan Jepang yang berlangsung hanya tiga setengah tahun namun mampu meninggalkan jejak psikologis dan simbolik yang jauh lebih dalam dibandingkan dengan tiga abad yang dihabiskan kolonial Belanda di Indonesia. Bagi rakyat Indonesia khususnya di Kotabaru, Yogyakarta tidak lagi dilihat sebagai kota terlarang yang suci nan tak tergoyahkan, melainkan sebagai ruang yang mampu untuk direbut, diduduki dan akhirnya dimiliki. Transformasi ini mampu menciptakan empat factor penentu Kotabaru yang menjadi bahan bakar utama “Revolusi Kotabaru” pada Oktober 1945.

Pertama, dimensi simbolik yang paling kuat. Kotabaru merupakan kawasan dengan julukan Eropa kecil yang paling nyata dan paling dekat di hati Yogyakarta. Selama lebih dari dua dekade, kawasan ini merupakan monumen hidup superioritas rasial dan kekuasaan kolonial Belanda: jalanan lebar beraspal, trotoar bergaya Eropa, rumah-rumah megah dengan taman luas, gereja, sekolah, dan rumah sakit yang hanya boleh diakses elite kulit putih. Bagi rakyat pribumi, Kotabaru adalah

lambang penindasan yang paling kasat mata sehingga menjadi simbol bahwa “orang Indonesia tidak boleh masuk ke sini”. Maka, merebut Kotabaru berarti membalikkan hierarki kolonial secara dramatis: dari “terlarang” menjadi “milik kita”. Pengibaran bendera Merah Putih di atas rumah-rumah Indies Empire style sama artinya dengan proklamasi kemerdekaan versi mikro yang jauh lebih terasa bagi rakyat jelata daripada teks proklamasi di Pegangsaan Timur.<sup>(22)</sup> Kedua, dimensi strategis dan material. Kotabaru memiliki infrastruktur kota modern yang tidak tertandingi di Yogyakarta pada 1945: listrik PLN stabil, jaringan telepon, jalan lebar yang bisa dilalui truk dan tank, rumah-rumah kokoh anti bom, serta lokasi yang sangat sentral, hanya beberapa ratus meter dari Benteng Vredenburg, Stasiun Lempuyangan, dan Kraton. Ketika Republik masih kekurangan segalanya seperti kantor, rumah dinas, rumah sakit, gudang senjata, Kotabaru menawarkan “paket lengkap” yang siap pakai. Satu kali serangan berhasil langsung memberikan ratusan bangunan representatif yang bisa dipakai untuk kementerian, markas laskar, rumah sakit darurat, dan kediaman pejabat tinggi. Tidak ada kawasan lain di Yogyakarta yang bisa memberikan keuntungan logistik sebesar ini dalam waktu singkat.

Ketiga, dimensi psikologis dan moral. Setelah proklamasi 17 Agustus 1945, Republik menghadapi krisis legitimasi: Belanda dan Sekutu menyebut proklamasi itu “omong kosong” karena Indonesia tidak punya ibu kota, tidak punya gedung pemerintahan, tidak punya tentara reguler. Merebut Kotabaru, kawasan yang paling identik dengan Belanda mampu menjadi cara paling efektif untuk membuktikan bahwa Republik bukan hanya slogan, melainkan kekuatan nyata yang mampu mengusir musuh dari



“kandangannya sendiri”. Bagi pemuda dan laskar yang baru saja dilatih Jepang (Heiho, PETA) dan kini menganggur setelah Jepang menyerah, serangan ke Kotabaru juga menjadi katarsis: peluang untuk membalas dendam atas segala bentuk diskriminasi rasial yang mereka alami selama puluhan tahun. Keempat, dimensi propaganda dan mobilisasi massa. Pada Oktober 1945, semangat revolusi masih sangat cair dan terfragmentasi. Banyak laskar belum sepenuhnya patuh pada pemerintah pusat, dan rivalitas antar kelompok (BKR, BPI, Hizbullah, Pesindo, dll) sangat tinggi. Serangan terkoordinasi ke Kotabaru menjadi “proyek bersama” yang mampu menyatukan semua elemen pejuang dalam satu tujuan yang jelas dan bergengsi. Keberhasilan serangan itu yang ternyata relative mudah karena Sebagian besar tentara Jepang sudah menyerah atau netral langsung menjadi berita besar di radio dan surat kabar republik, meningkatkan moral nasional secara drastis. Kotabaru menjadi “trofi pertama” yang bisa dipamerkan kepada dunia bahwa Republik Indonesia bukan negara boneka, melainkan kekuatan yang mampu mengambil alih aset kolonial paling prestisius(23)

Dengan demikian, Kotabaru bukan sekadar salah satu target, melainkan target nomor satu yang wajib direbut lebih dulu sebelum kawasan lain. Penguasaan Kotabaru pada 7 Oktober 1945 bukan hanya kemenangan militer, melainkan deklarasi politik yang paling berani dan paling simbolis dari Republik muda: bahwa ruang yang selama ini menjadi lambang penjajahan kini telah menjadi jantung kekuasaan nasional yang baru.

### **3.5 Peran Sosial Politik Kotabaru Sebagai Simbol Perjuangan Rakyat**

Setelah Proklamasi Kemerdekaan dan dipindahkannya ibu kota Republik Indonesia ke Yogyakarta pada 1946, Kotabaru menjadi salah satu target utama pengambilalihan oleh pemerintah Republik. Rumah-rumah dan aset yang ditinggalkan oleh Jepang dan sebelumnya oleh Belanda, diambil alih untuk menunjang kelangsungan pemerintahan dan perjuangan. Pengambilalihan ini bukanlah tindakan anarkis melainkan sebuah langkah politik yang dilembagakan untuk menegaskan kedaulatan Republik atas sebuah kawasan yang sarat muatan simbolik kolonial. Tindakan ini dapat dilihat sebagai upaya “rebutan ruang” (*spatial appropriation*) yang merupakan bagian integral dari revolusi sosial di mana kelompok revolusioner merebut dan mengubah makna ruang-ruang yang sebelumnya dikuasai oleh kekuasaan lama.(24)

Ketika Yogyakarta menjadi ibu kota Republik, Rumah Sakit Panti Rapih dan Bethesda berperan sentral dalam mendukung perjuangan. Panti Rapih, yang dikelola oleh Ordo Carolus, menjadi tempat perawatan rahasia bagi banyak pejuang yang terluka dalam pertempuran. Para suster dan dokter di sini seringkali mempertaruhkan keselamatan mereka dengan merahasiakan identitas pasien pejuang dari intelijen Belanda. Sementara itu, Rumah Sakit Bethesda, yang memiliki afiliasi dengan misi Protestan, juga berfungsi dengan kapasitas yang sama. Aktivitas ini menunjukkan bagaimana institusi-institusi sosial yang awalnya didirikan untuk melayani komunitas Eropa bertransformasi menjadi tulang punggung logistik kemanusiaan bagi masyarakat lokal. Peran kedua rumah sakit ini dapat dianalisis melalui konsep “infrastruktur sosial”. Dalam konteks perang, rumah sakit tidak hanya menjadi infrastruktur kesehatan, tetapi juga

infrastruktur ketahanan dan perlawanan. Kemampuan mereka untuk terus beroperasi, meski di tengah tekanan dan keterbatasan, menyediakan sebuah *safe haven* yang memungkinkan para pejuang untuk pulih dan kembali ke medan pertempuran. Ini adalah contoh nyata dari bagaimana ruang-ruang sipil di Kotabaru diartikulasikan ulang untuk mendukung proyek nasional yang lebih besar.(25) Keberadaan Gereja St. Antonius yang terletak di jantung Kotabaru, menjalankan peran ganda yang sangat krusial. Di samping sebagai tempat ibadah, gereja ini menjadi tempat perlindungan yang relatif aman bagi para pejuang dari berbagai latar belakang, termasuk mereka yang berbeda agama. Ruang bawah tanah dan ruang pastorannya sering digunakan untuk menyelenggarakan rapat-rapat rahasia antara kelompok-kelompok pejuang, politisi, dan diplomat. Peran ini menunjukkan bahwa dalam situasi revolusi, batas-batas identitas keagamaan dapat ditransendensi untuk mencapai tujuan bersama.(26)

Fungsi Gereja St. Antonius sebagai ruang rahasia sebagai *hidden transcript* sebuah ruang di mana para subordinat (dalam hal ini kaum republiken) dapat berorganisasi dan merencanakan strategi di luar pengawasan kekuasaan dominan (Belanda). Keberadaan ruang semacam ini sangat vital bagi kelangsungan perjuangan gerilya. Lebih dari itu, gereja ini menjadi simbol toleransi yang hidup di mana nilai-nilai kemanusiaan dan kebangsaan mengatasi perbedaan keyakinan, sebuah pesan yang sangat kuat dalam konteks Indonesia yang majemuk.(27) Kemudian sekolah-sekolah di Kotabaru, seperti SMA Bopkri, menjadi benteng penting dalam mempertahankan semangat nasionalisme di kalangan generasi muda. Di bawah kepemimpinan guru-

guru pribumi, kurikulum di sekolah-sekolah ini diisi dengan semangat patriotisme dan cinta tanah air. Ruang-ruang kelas tidak hanya untuk transfer ilmu pengetahuan, tetapi juga untuk menyebarkan propaganda perlawanan terhadap Belanda. Para pelajar dari sekolah-sekolah ini banyak yang kemudian bergabung dengan laskar-laskar pejuang atau menjadi tenaga administrasi bagi pemerintah Indonesia. Aktivitas di sekolah-sekolah Kotabarudapat dilihat melalui lensa pendidikan politik. Proses pendidikan tidak netral karena ia merupakan medan perjuangan untuk membentuk kesadaran nasional. Dengan menanamkan nilai-nilai cinta tanah air, sekolah-sekolah ini berperan dalam menciptakan dan mereproduksi "modal sosial" dan "modal kultural" yang diperlukan untuk membangun sebuah negara-bangsa. Para lulusannya menjadi tenaga-tenaga terdidik yang siap mengisi pos-pos penting dalam birokrasi dan diplomasi di wilayah Kotabaru dan sekitarnya.(28)

Sebagai ibu kota Republik Indonesia sementara, Yogyakarta membutuhkan kantor-kantor pemerintahan, dan banyak di antaranya menempati gedung-gedung di Kotabaru. Berbagai kementerian, jawatan, dan perwakilan diplomatik asing (seperti dari India dan Australia) mendirikan kantornya di kawasan ini. Misalnya, gedung-gedung di Jalan Dr. Wahidin dan sekitarnya menjadi pusat aktivitas administrasi negara. Konsentrasi kantor pemerintahan ini membuat Kotabaru berfungsi sebagai pusat otak atau *brain center* dari Republik Indonesia, di mana kebijakan-kebijakan penting dirumuskan dan dikoordinasikan.(29) Pemusatan administrasi di Kotabaru merupakan sebuah strategi politik dan keamanan. Dengan memanfaatkan infrastruktur yang sudah ada seperti bangunan-bangunan kokoh dengan kondisi jalan

yang baik, pemerintah Republik Indonesia dapat menjalankan fungsinya dengan relatif efisien. Hal ini sesuai dengan konsep *state spatialization* dari Brenner & Elden, di mana negara membutuhkan dan memproduksi ruang-ruang tertentu untuk menegaskan dan mereproduksi kedaulatannya. Kotabaru, yang dahulu adalah ruang kolonial, ditransformasikan menjadi ruang untuk menjalankan kedaulatan Republik Indonesia.(30)

Pola permukiman ini menciptakan sebuah *politicized community*. Kehidupan sehari-hari elite Republik terjalin dalam sebuah jaringan sosial yang padat, yang memperkuat kohesi internal di antara mereka. Menurut teori *embeddedness* tindakan ekonomi dan politik para aktor tersebut tertanam dalam jaringan hubungan sosial yang konkret dan berkelanjutan. Jaringan yang terbentuk di Kotabaru ini menjadi modal sosial yang sangat berharga untuk menjaga kelangsungan pemerintahan di tengah tekanan militer Belanda.(31) Kotabaru juga menjadi arena diplomasi yang penting. Rumah-rumah dinas menteri dan gedung-gedung perwakilan asing menjadi tempat berlangsungnya pertemuan dan lobi-lobi politik, baik secara internal antar faksi perjuangan maupun dengan perwakilan negara asing dan organisasi internasional seperti Palang Merah. Aktivitas diplomasi "di balik pintu tertutup" ini seringkali lebih menentukan daripada komunikasi formal. Peran Kotabaru dalam diplomasi menunjukkan bahwa perjuangan kemerdekaan tidak hanya terjadi di medan tempur tetapi juga di ruang-ruang pertemuan yang elegan. Kemampuan para pemimpin untuk memanfaatkan ruang-ruang peninggalan kolonial untuk menjalankan diplomasi internasional adalah sebuah tindakan yang penuh simbolisme.

#### 4. KESIMPULAN

Revolusi Kotabaru 7 Oktober 1945 merupakan titik kulminasi dari proses transformasi panjang yang mengubah kawasan "Nieuwe Wijk" dari simbol supremasi kolonial Belanda menjadi jantung kekuasaan Republik Indonesia yang baru lahir. Pembangunan Kotabaru sebagai enclave Eropa dengan segregasi spasial ketat, diikuti retaknya tembok eksklusivitas pada akhir era kolonial dan masa pendudukan Jepang, serta runtuhnya mitos keabadian kekuasaan kulit putih pada 1942–1945, menjadi katalisator psikologis terkuat. Ketika rumah-rumah mewah ditinggalkan dan kemudian ditempati orang Indonesia, persepsi rakyat berubah drastis: dari "kawasan terlarang" menjadi "trofi yang wajib direbut". Inilah yang menjadikan Kotabaru target utama revolusioner karena nilai simbolik, strategis, psikologis, dan propaganda. Tanpa pemahaman proses ini, narasi Revolusi Nasional Indonesia akan tetap parsial.

Penguasaan Kotabaru kemudian memungkinkan transformasi fungsi yang jauh lebih mendalam: rumah sakit Panti Rapih dan Bethesda menjadi infrastruktur ketahanan gerilya, Gereja St. Antonius berubah menjadi "*hidden transcript*" lintas agama, sekolah-sekolah mencetak kader nasionalis, dan gedung-gedung megah menjadi "brain center" Republik serta arena diplomasi internasional. Kotabaru membuktikan bahwa revolusi fisik dan revolusi sosial adalah dua sisi mata uang yang sama: merebut ruang sekaligus merebut maknanya adalah cara paling efektif membangun legitimasi dan kedaulatan di tengah kekacauan pasca-proklamasi. Hingga kini, Kotabaru tetap menjadi monumen hidup paradoks sejarah Indonesia yang merupakan warisan kolonial yang paling indah sekaligus saksi perjuangan paling heroik bangsa untuk menegaskan bahwa ruang

penindasan dapat diubah menjadi simbol kemerdekaan yang abadi.

#### DAFTAR PUSTAKA

1. Hadi F, Ristawati R. Pemindahan ibu kota Indonesia dan kekuasaan presiden dalam perspektif konstitusi. JK. 2020 Nov 10;17(3):530–57.
2. Nisa I, Haryono MJD, Budiman H. Perkembangan citra kawasan Kotabaru Yogyakarta. Jurnal Sakapari. 2024;7(1).
3. Kusno A. Behind the postcolonial: architecture, urban space, and political cultures in Indonesia. Psychology Press; 2000. 268 p.
4. Aprianto ID, Yulianto AE. Askar Perang Sabil dalam revolusi fisik di Yogyakarta tahun 1945-1949. WJSB. 2019 Dec 4;10(2):175–84.
5. Moore M. A political theory of territory [Internet]. Oxford University Press; 2015 [cited 2026 Jan 24]. Available from: <https://academic.oup.com/book/1473>
6. Kuntowijoyo. Pengantar ilmu sejarah. Bentang Pustaka; 2005. 207 p.
7. Krippendorff K. Content analysis: an introduction to its methodology. SAGE Publications; 2018. 473 p.
8. Sunjayadi A. Mengabadikan estetika fotografi dalam promosi pariwisata kolonial di Hindia-Belanda. Wacana. 2008 Oct 1;10(2):301.
9. Wihardiyanto D, Sarwadi A, Djunaedi A. The development of the Dutch colonial settlement in the city of Yogyakarta after the implementation of the Decentralisatie Wet policy (1903-1942). Jurnal Arsitektur. 2023 July 31;13(2):159–78.
10. Fakhri F. Kotabaru and the housing estate as bulwark against the indigenization of colonial Java. In 2015. p. 152–71.
11. Farida A, Chintya NPP, Mutiarasari WM. Visualisasi bangunan peninggalan Belanda di Kotabaru Yogyakarta melalui ESRI Story Map. REKA GEOMATIKA [Internet]. 2018 [cited 2026 Jan 24];2018(1). Available from: <https://ejurnal.itenas.ac.id/index.php/rekageomatika/article/view/2657>
12. Kartikakirana RA, Neritarani R. Perkembangan fungsi perkotaan kawasan Kotabaru, Kota Yogyakarta ditinjau pada periode 1925 dan 2021. JPK. 2022 July 4;10(1):83–92.
13. Fauzia VA, Kurniawan EB, Wijaya INS. Tingkat perubahan bangunan Hindia Belanda di kawasan cagar budaya Kotabaru, Kota Yogyakarta. Tata Kota dan Daerah. 2021 Dec 31;13(2):87–98.
14. Stoler AL. Making empire respectable: the politics of race and sexual morality in 20th-century colonial cultures. American Ethnologist. 1989;16(4):634–60.
15. Sinta PDY, Baskoro AC. Kebijakan sosial dan ekonomi pemerintah pendudukan Jepang di Yogyakarta dalam Kan Po 1942-1945. Bama [Internet]. 2023 Sept 18 [cited 2026 Jan 24];28(1). Available from: <https://ejournal.usd.ac.id/index.php/BandarMaulana/article/view/7226>
16. Agnatie LAD, Triwahana. Perubahan fisik dan dampak sosial kawasan Kotabaru di Yogyakarta 1917-1945. Karmawibangga: Historical Studies Journal. 2022;4(1):1–8.
17. Aguswin A, Akromusyuhada A. Pelestarian bangunan arsitektural kolonial Belanda di kawasan Kotabaru, Yogyakarta. Pelita Teknologi. 2021 July 15;16(1):66–78.
18. Sato S. War, nationalism and peasants: Java under the Japanese occupation, 1942-1945. M.E. Sharpe; 1994. 308 p.
19. Reid A. The Indonesian national revolution, 1945-1950. Longman; 1974. 214 p.

20. Scott JC. Weapons of the weak: everyday forms of peasant resistance. Yale University Press; 2008. 422 p.
21. Frederick WH. Visions and heat: the making of the Indonesian revolution. Ohio University Press; 1989. 376 p.
22. Anderson B. Java in a time of revolution: occupation and resistance, 1944-1946. Equinox Publishing; 2006. 518 p.
23. Arvianita I, Basuki YE. Pertunjukan amal: dana awal perjuangan rakyat di Yogyakarta 1945-1947. *lembaran-sejarah*. 2023 Jan 10;18(1):25.
24. Prihantoro F. A cultural heritage management perspective: Kotabaru, Yogyakarta, between a protected cultural site and a commercial area. *Hum*. 2021 July 31;33(2):146.
25. Klinenberg E. Review of Palaces for the People: how social infrastructure can help fight inequality, polarization, and the decline of civic life. *American Journal of Sociology*. 2019;125(2):601–3.
26. Aritonang JS, Steenbrink KA. A history of Christianity in Indonesia. BRILL; 2008. 1021 p.
27. Scott JC. The art of not being governed: an anarchist history of upland Southeast Asia [Internet]. Yale University Press; 2009 [cited 2026 Jan 24]. Available from: [tautan mencurigakan telah dihapus]
28. Bourdieu P. The forms of capital. *Handbook of Theory and Research for the Sociology of Education*. 1986.
29. Kahin A. Regional dynamics of the Indonesian revolution: unity from diversity. University of Hawaii Press; 1985. 328 p.
30. Brenner N, Elden S. Henri Lefebvre on state, space, territory. *International Political Sociology*. 2009 Dec;3(4):353–77.
31. Granovetter M. Economic action and social structure: the problem of embeddedness. *American Journal of Sociology*. 1985;91(3):481–510..